

ANALISIS PERAN *AIESEC* IN UNHAS DALAM MENGURANGI PENCEMARAN SAMPAH LAUT DI PANTAI BIRU UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SDG 14

Laagimo Kasih Pakambanan¹, Atika Puspita Marzaman²

^{1,2}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah,
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 2024

Revised December 2024

Accepted Decemberr 2024

Available online December 2024

Korespondensi: Email :

agipakambanan@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

Marine debris pollution poses a serious challenge that threatens marine ecosystems and the sustainability of coastal life. This research aims to analyze the role of AIESEC in UNHAS with collaborative approach among various stakeholders in reducing marine debris pollution and supporting the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 14. The methods used in this study is descriptive qualitative include field experiences at Pantai Biru. The results indicate that effective collaboration between the academics, local volunteers, and private sectors has led to significant initiatives, such as marine debris reduction environmental awareness campaigns. The study concludes by emphasizing the importance of awareness of every beach visitor in maintaining marine cleanliness as well as sustainable collaborative approach to strengthen cooperation between stakeholders in achieving SDG 14.

Keywords: *AIESEC in UNHAS, Stakeholder Collaboration, Marine Debris Pollution, Pantai Biru, SDG 14*

Abstrak

Pencemaran sampah laut merupakan tantangan serius yang mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan kehidupan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *AIESEC* in UNHAS yang berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Makassar untuk mengurangi pencemaran sampah laut dan dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14 “*Life Below Water*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif meliputi pengalaman lapangan di Pantai Biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta telah menghasilkan inisiatif yang signifikan dalam pengurangan sampah laut dan kampanye kesadaran lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan

pentingnya kesadaran setiap pengunjung pantai dalam menjaga kebersihan laut serta pendekatan kolaboratif untuk memperkuat kerjasama antar *stakeholder* demi mencapai SDG 14.

Kata Kunci : *AIIESEC* in UNHAS, Kolaborasi *Stakeholder*, Pencemaran Sampah Laut, Pantai Biru, SDG 14

1. LATAR BELAKANG

Pencemaran sampah plastik telah menjadi isu global yang mendesak dengan dampak serius terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Sampah laut adalah bahan-bahan padat yang dihasilkan atau diproses, lalu dibuang atau ditinggalkan di laut dan daerah pesisir. Sampah ini kini menjadi masalah besar yang memengaruhi lingkungan dan ekonomi di seluruh dunia. (Agamuthu et al., 2019) Sampah plastik, termasuk mikroplastik, memiliki kemampuan untuk menyebar secara luas di perairan dan sering kali ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Pantai Biru. Pencemaran ini berdampak langsung pada kehidupan laut dengan mikroplastik yang dikonsumsi oleh ikan dan organisme laut lainnya yang kemudian berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Masalah ini muncul seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan peningkatan konsumsi barang dan volume sampah yang dihasilkan (Hakim, 2019, p.112).

Laut dan pesisir memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan mendukung kehidupan jutaan orang yang bergantung pada sumber daya laut untuk penghidupan. Namun, pencemaran sampah laut telah menjadi ancaman yang semakin serius bagi keberlanjutan ekosistem laut. Sampah laut, terutama sampah plastik, tidak hanya merusak ekosistem bawah laut, tetapi juga mengganggu kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut sebagai sumber mata pencaharian. Pantai Biru sebagai salah satu wilayah pesisir di Sulawesi Selatan merupakan contoh kawasan yang mengalami tekanan signifikan akibat peningkatan pencemaran sampah laut. Tujuan wisatawan yang berkunjung di Pantai Biru sangat beragam, mulai dari usia muda yang datang berlibur, hingga lanjut usia yang melakukan terapi kesehatan (Muhaer et al., 2024, p.137). Seiring dengan tingginya aktivitas pariwisata dan kurangnya pengelolaan sampah yang efektif, Pantai Biru menghadapi tantangan besar dalam menjaga kebersihan laut dan lingkungan pesisirnya. Dengan mengurangi produksi plastik di daratan, sampah plastik tidak akan berakhir di lautan dan dapat mencegah kerusakan lingkungan laut yang lebih lanjut (Aqilla, 2023, p.277).

Dalam menghadapi tantangan ini, *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 14 yang bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan laut secara berkelanjutan menjadi panduan utama dan tujuan global untuk melindungi kehidupan bawah air. SDG 14 menekankan perlunya upaya kolektif untuk mengurangi berbagai bentuk pencemaran laut, termasuk sampah laut. Diperlukan pendekatan kolaboratif dari berbagai *stakeholder*, seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menemukan solusi yang berkelanjutan

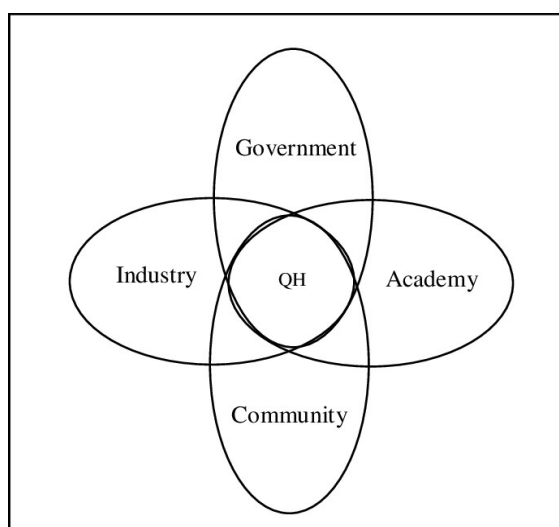
. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan terpadu dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam upaya mengurangi pencemaran sampah laut, kolaborasi antara berbagai *stakeholder* memegang peranan penting. Pencemaran laut oleh sampah telah menjadi masalah global yang mengancam ekosistem laut, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan keindahan laut itu sendiri. Teori-teori yang relevan untuk memahami kolaborasi *stakeholder* dan upaya pengurangan pencemaran laut meliputi teori *Quadruple Helix* serta konsep tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 14.

a. Model *Quadruple Helix*

Model ini mengembangkan konsep *Triple Helix* dengan menambahkan elemen keempat yaitu masyarakat sipil karena inovasi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan tidak hanya melibatkan kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan akademisi, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, yang diwakili oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi non-pemerintah (NGO). Model ini memperkenalkan pemecahan masalah yang tertarik pada solusi berkelanjutan, menekankan perspektif pembangunan berkelanjutan yang menyatukan inovasi, kewirausahaan, dan demokrasi (Cai & Lattu, 2022, p.265).



Sumber : Saepuloh et al., 2022
Gambar 1. Model *Quadruple Helix*

Institusi akademik menyediakan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengajar yang ahli di bidangnya. Kemudian, perusahaan swasta berperan sebagai mitra untuk bekerja sama dalam meningkatkan citra perusahaan sekaligus mendukung kebutuhan kegiatan. Selanjutnya, pemerintah dalam menyediakan kebijakan yang mendukung inovasi dan menyediakan regulasi untuk riset dan pengembangan. Adapun kelompok masyarakat dan individu terlibat dalam memberikan umpan balik, mempengaruhi kebijakan publik, dan menciptakan permintaan untuk solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu organisasi non-pemerintah (NGO) yang aktif di Makassar, *AIESEC* in UNHAS memiliki peran dalam mendekatkan mahasiswa dengan memfasilitasi pengembangan potensi generasi pemuda melalui berbagai program pelatihan dan pengalaman kegiatan. Dalam hal ini, *AIESEC* in UNHAS tidak hanya memfokuskan kegiatannya pada pengembangan individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Makassar. Dengan menerapkan model *Quadruple Helix*, *AIESEC* in UNHAS sebagai NGO memiliki peran yang signifikan. Program-program yang dijalankan oleh *AIESEC* memberi mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Di sisi lain, perguruan tinggi melalui *AIESEC* juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah untuk mendukung pengembangan inovasi dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh *AIESEC*, terutama yang berhubungan dengan pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan muda. Melalui kebijakan yang mendukung kolaborasi antara perguruan tinggi, sektor industri, dan masyarakat, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif untuk inovasi dan kewirausahaan. *AIESEC* in UNHAS juga sering kali bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mendukung inisiatif yang dapat memberi dampak positif bagi perkembangan sosial dan ekonomi di tingkat daerah.

Dalam menjalin hubungan dengan sektor swasta, *AIESEC* in UNHAS membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proyek kolaboratif. Sektor industri mendapatkan keuntungan dari partisipasi dalam program-program *AIESEC* karena mereka dapat mengakses talenta-talenta muda yang memiliki potensi inovatif, serta meningkatkan keberagaman dalam tim mereka. Kolaborasi ini mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing industri yang lebih berkelanjutan.

Masyarakat juga menjadi elemen penting dalam penerapan model *Quadruple Helix* karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari solusi inovatif yang dihasilkan oleh kolaborasi ini. *AIESEC* in UNHAS berperan dalam memastikan bahwa program-program yang mereka jalankan tidak hanya berfokus pada aspek individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas. Sebagai NGO, *AIESEC* in UNHAS turut memperkenalkan solusi-solusi untuk masalah sosial dan lingkungan yang ada, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasinya.

Melalui kolaborasi yang melibatkan institusi akademik, sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat, *AIESEC* in UNHAS sebagai inisiator dan penyelenggara kegiatan dapat membantu menciptakan inovasi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Keberhasilan kolaborasi ini bergantung pada kemampuan *AIESEC* dalam menjembatani komunikasi dan kerja sama antara berbagai *stakeholder*, serta untuk menciptakan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Namun, keempat elemen dalam model *Quadruple Helix* tetap harus bekerja sama secara kolaboratif, sehingga setiap pihak dapat berperan sesuai fungsinya dan menghasilkan dampak yang optimal (Sulaksono, 2018, p.367)

b. Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kerangka acuan global untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. SDG 14 “*Life Below Water*” berupaya memajukan pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan ekosistem laut dan pesisir (Acharya, 2023, p.5) serta mengurangi pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan manusia, terutama pencemaran sampah laut guna memastikan keberlanjutan kehidupan di lautan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Hal ini jelas terlihat dalam SDG 14 yang bertujuan untuk “melestarikan dan menggunakan lautan, samudra, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan” (Haward & Haas, 2021). Tujuan ini sangat penting karena lautan menyimpan berbagai sumber daya alam yang vital untuk kehidupan manusia. bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 14 menjadi acuan penting untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. SDG 14 menekankan perlunya tindakan mendesak untuk mencegah dan secara signifikan mengurangi berbagai bentuk pencemaran laut, termasuk sampah plastik. Pencapaian target SDG 14 tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi dalam suatu kerangka kolaborasi yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kolaborasi *stakeholder* dalam mengurangi pencemaran sampah laut di Pantai Biru guna mendukung pencapaian SDG 14. Data dikumpulkan melalui pengalaman lapangan sebagai relawan dalam kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* yang bekerja sama, serta observasi lapangan di Pantai Biru. Penerapan model *Quadruple Helix* untuk menganalisis peran masing-masing *stakeholder* dalam menangani pencemaran sampah laut. Penelitian ini bertujuan

untuk memberikan gambaran tentang efektivitas kolaborasi antar *stakeholder* serta kontribusi mereka terhadap pengurangan sampah laut dan pencapaian SDG 14.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Stakeholder* dalam Mengurangi Pencemaran Sampah Laut di Pantai Biru

Salah satu penyebab utama pencemaran sampah laut di Pantai Biru adalah kurangnya kesadaran dari pengunjung tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan kemasan makanan, yang mudah terbawa arus ke laut. Meskipun sudah ada fasilitas tempat sampah di beberapa titik, kesadaran individu untuk tidak membuang sampah sembarangan masih sangat rendah. Hal ini memperburuk kondisi kebersihan pantai dan mengarah pada akumulasi sampah yang berdampak langsung pada ekosistem laut. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian sampah, namun masyarakat juga harus berperan aktif dalam berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kesadaran menjadi faktor kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Akbar & Maghfira, 2023, p.26).

Selain kesadaran individu dan kelompok, pengelolaan sampah yang tidak efektif juga disebabkan oleh peraturan yang kurang ketat dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait kebersihan pantai. Meskipun pemerintah daerah sudah memiliki peraturan mengenai pengelolaan sampah, implementasi di lapangan nyatanya masih lemah. Kurangnya pengawasan terhadap pengunjung dan kurangnya sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan menyebabkan perilaku membuang sampah sembarangan tetap terjadi.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Perundangan ini berisi bahwa dalam mengelola sampah agar berjalan dengan baik, dibutuhkan kepastian hukum, penentuan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah yang jelas, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor usaha, sehingga proses tersebut bisa berlangsung secara efektif dan efisien (Riksfardini & Asmara, 2023, p.218). Tingginya kebutuhan akan pelayanan mengharuskan pemerintah untuk terus menghadapi masalah kebersihan, khususnya yang berkaitan dengan sampah. Pada umumnya, peningkatan produksi sampah jauh lebih cepat daripada upaya penanganannya. Oleh karena itu, isu ini memerlukan perhatian yang lebih serius dari pihak pemerintah (Hamdan & Rifani, 2018, p.45).

Adapun tugas pemerintah dan pemerintahan daerah, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta melakukan koordinasi aktif antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha agar terciptanya keselarasan dalam pengelolaan sampah (Dyni, 2023, p.82). Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga perlu untuk diperhatikan agar aturan tentang pengelolaan sampah ditegakkan dengan baik, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang tidak

mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada. Walaupun pemerintah berusaha menciptakan lingkungan laut yang bersih dengan menetapkan peraturan, namun pada akhirnya, menjaga kebersihan tetap menjadi tanggung jawab setiap individu (Mokodompit, 2021, p.184).

Pada umumnya, sektor swasta berperan sebagai sponsor dalam kegiatan yang memberikan dukungan finansial, fasilitas penunjang, dan sumber daya yang diperlukan selama pelaksanaan program. Keterlibatan sektor swasta tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga memperkuat jaringan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan dampak sosial yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan melihat kegiatan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mendukung citra positif mereka di mata masyarakat. Selain itu, kerja sama dalam bentuk media partner untuk menyebarluaskan dan mempromosikan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga kebersihan pantai. Sehingga, adanya kerja sama antara sektor swasta dan *stakeholder* lainnya akan saling menguntungkan.

AIESEC in UNHAS (Universitas Hasanuddin) berperan sebagai salah satu platform yang menghubungkan mahasiswa dengan peluang pengembangan diri melalui berbagai kegiatan, salah satunya yaitu program pengabdian sosial. Saat ini, *AIESEC* in UNHAS terdiri atas mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Makassar, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Fajar, dan lainnya. Dengan misi untuk melibatkan setiap generasi muda dalam mewujudkan potensi mereka dan mempersiapkan agar dapat menjadi generasi pemimpin berikutnya melalui berbagai program yang dimiliki. *AIESEC* in UNHAS berkomitmen dalam memberdayakan generasi muda dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, *AIESEC* in UNHAS memiliki peran sebagai fasilitator dalam menghubungkan berbagai *stakeholder*, seperti pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengurangi pencemaran sampah laut. Salah satu program dari *Local Project by AIESEC in UNHAS* yaitu *Greeneration 15.0* yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023 lalu. Selain pengurus dan panitia, terdapat peserta sebanyak 48 mahasiswa ikut berperan sebagai relawan yang difasilitasi dengan pendidikan dan pengembangan diri lewat *webinar*, *workshop*, dan berbagai rangkaian kegiatan yang wajib diikuti selama program berlangsung. Hal ini bertujuan agar peserta memiliki bekal pengetahuan sebelum memberikan edukasi di beberapa sekolah yang ada di Makassar. Kerja sama yang baik antar pihak *AIESEC* in UNHAS bersama pihak sekolah telah menyukseskan salah satu rangkaian kegiatan yaitu *School Roadshow*, di mana para relawan diberikan kesempatan untuk membagikan pengetahuan kepada para siswa di tingkat SMP.

Adapun puncak kegiatan dari program ini yaitu bersama-sama melakukan pembersihan sampah di area tepi Pantai Biru menggunakan peralatan yang telah disediakan. Selain membersihkan sampah, para peserta yang dibagi dalam beberapa tim juga diberikan kertas yang berisi tabel jenis-jenis sampah sehingga sampah yang diambil harus dicatat sesuai dengan

jenisnya. Selama kegiatan pembersihan pantai, sampah yang terkumpul sebagian besar terdiri dari sampah plastik, kemasan makanan, puntung rokok, serta sampah lainnya yang berasal dari aktivitas wisatawan.

Masyarakat sipil dalam hal ini warga sekitar dan mahasiswa sebagai relawan juga memainkan peran krusial dalam kegiatan ini. Partisipasi warga sekitar dalam memberi akses dan izin untuk melaksanakan kegiatan serta kontribusi relawan dalam menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut, dapat mendorong keberhasilan kegiatan ini. Secara tidak langsung, mereka ikut andil sebagai agen perubahan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi sehingga mempengaruhi perilaku orang lain dengan isu pengelolaan sampah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk lingkungan laut merupakan usaha manusia dalam berinteraksi dengan alam untuk menjaga kehidupan demi mencapai kesejahteraan manusia serta kelestarian lingkungan (Mokodompit, 2021, p.177). Sebagai individu yang berperan sebagai relawan dan turut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, aksi membersihkan sampah dapat menjadi bukti nyata untuk mendukung keberhasilan kegiatan akademisi dan kebijakan pemerintah. Aksi membersihkan sampah yang dilakukan memang bersifat jangka pendek, namun yang lebih penting dalam jangka panjang dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik yang sulit terurai (Kabar YKL Indonesia, 2024).

Meskipun ada upaya yang signifikan dalam membersihkan pantai dan mengurangi pencemaran sampah laut, tantangan terbesar adalah memastikan kelestarian yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Setelah pantai dibersihkan, sampah baru akan kembali terbawa oleh arus ke pantai pada hari-hari berikutnya, terutama jika intensitas pengunjung meningkat dan kesadaran masyarakat belum terbangun dengan baik. Pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan dan kurangnya pengawasan terhadap perilaku pengunjung membuat upaya pembersihan hanya bersifat sementara.

Kegiatan pembersihan pantai dinilai bergantung pada organisasi-organisasi dalam mengadakan aksi membersihkan lingkungan dan partisipasi masyarakat. Namun, keberlanjutan kegiatan ini menjadi masalah ketika partisipasi relawan mulai menurun, terutama jika tidak ada inisiatif dan dukungan yang cukup untuk menjaga keterlibatan mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa kegiatan pelestarian pantai tidak hanya bergantung pada kegiatan sukarela, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat terbukti dapat menciptakan sinergi dalam pengurangan pencemaran sampah laut di Pantai Biru. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang berbeda namun saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Koordinasi dan komunikasi aktif antar pihak-pihak sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan bersama dan memberikan dampak yang positif.

Pencapaian SDG 14

Sustainable Development Goal (SDG) 14 “Live Below Water” bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan laut, samudra, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup berbagai tindakan untuk menjaga ekosistem laut, mengurangi polusi laut, serta melindungi spesies laut yang terancam punah. Dalam konteks ini, *AIESEC* in UNHAS sering bekerja sama dengan pemerintah lokal dan nasional untuk menjalankan berbagai inisiatif yang mendukung SDG 14. Kolaborasi ini sering kali melibatkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan serta regulasi yang memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

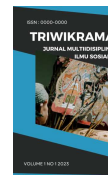
Salah satu kegiatannya dengan menginisiasi proyek yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan dampak yang ditimbulkan dari sampah laut. Sebagai bagian dari kampanye SDG 14, *AIESEC* in UNHAS mengadakan pelatihan dan *workshop* yang melibatkan akademisi untuk mendalami isu-isu laut dan pengelolaan sumber daya laut. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dan masyarakat sipil yang memenuhi syarat sebagai relawan diberikan ruang untuk berpartisipasi langsung dalam membersihkan sampah-sampah yang mencemari laut dan pantai. Dengan ini, masyarakat juga dilibatkan dalam pendidikan tentang dampak plastik terhadap ekosistem laut.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat, *AIESEC* in UNHAS mampu menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung pencapaian SDG 14 di tingkat lokal. Dengan menggabungkan kebijakan pemerintah, riset akademik, inovasi sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat, inisiatif-inisiatif ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian laut dan sumber daya laut.

Kegiatan yang diwadahi oleh *AIESEC* in UNHAS berhasil membuktikan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif di dunia yang dimulai dari lingkungan terdekat dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dalam menggerakkan pencapaian SDG 14. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk menjaga kelestarian laut dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kolaborasi, pencapaian SDG 14 dapat terwujud secara efektif dan berdampak luas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pencemaran sampah di laut bisa dicegah jika kita peduli dan memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai yang langsung dibuang dan sulit didaur ulang. Membuang sampah pada tempatnya saja tidak cukup, karena dampaknya akan terasa di masa depan. Kita juga bisa memilih barang-barang yang ramah lingkungan, dan ada banyak cara lain untuk menjaga kelestarian alam. Untuk mewujudkan pencapaian SDG 14 dengan efektif, partisipasi berkelanjutan dari seluruh pihak sangat diperlukan. Hal ini mencakup dukungan dari pemerintah melalui peraturan yang lebih

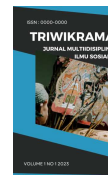


tegas serta kegiatan dan edukasi kesadaran lingkungan yang berkelanjutan, guna mendorong masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian ekosistem laut.

Diperlukan penelitian jangka panjang untuk melihat perubahan dalam kebiasaan masyarakat dan dampak kebijakan yang diterapkan terhadap pencemaran sampah laut. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis perbandingan dengan daerah pantai lainnya yang memiliki masalah serupa, guna mendapatkan solusi yang dapat diterapkan secara luas di Indonesia. Terdapat beberapa kegiatan lainnya selain aksi membersihkan pantai yang dapat mengurangi pencemaran sampah laut, serta isu lingkungan lainnya yang perlu diperhatikan untuk mendukung pencapaian target SDG 14 secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang hanya berfokus pada Pantai Biru dan tidak mencakup kawasan lain yang mungkin memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda dalam hal pencemaran sampah laut. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, sehingga hanya mencakup situasi dan kondisi yang ada pada saat penelitian berlangsung. Kondisi pencemaran sampah laut di Pantai Biru dapat berubah seiring waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, J. (2023). Marine Pollution and SDG 14 Implementation Degree of Challenges and Combat Strategies. *IIRE Journal of Maritime Research and Development*, 7(2), 1-33.
- Agamuthu, P., Mehran, S., & Norkhairah, A. (2019). Marine debris: A review of impacts and global initiatives. *Waste Management & Research*, 37(10), 987-1002.
- Akbar, M., & Maghfira, A. (2023, Mei). Pengaruh Sampah Plastik Dalam Pencemaran Air Laut di Kota Makassar. *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, 6(1), 25-29.
- Aqilla, A. R. (2023). Pengaruh Sampah Plastik dalam Pencemaran Air. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(Desember 2023), 275-280.
- Cai, Y., & Lattu, A. (2022). Triple Helix or *Quadruple Helix*: Which Model of Innovation to Choose for Empirical Studies? *Minerva*, 60, 257-280. Retrieved from <https://rdcu.be/d1o7c>
- Dyni, S. B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kebersihan Wisatawan Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak di Tinjau dari Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009. *Senaskah: Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara dan Hukum*, 1, 79-84.
- Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. *Amanna Gappa*, 27(2), 111-121.
- Hamdan, & Rifani, D. N. (2018). Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Paradigma*, 7(1), 45-54.
- Haward, M., & Haas, B. (2021). The Need for Social Considerations in SDG 14. *Frontiers in Marine Science*, 8(632282).
- Kabar YKL Indonesia. (2024). Persoalan Sampah dan Anak Muda Kota Makassar di Hari Lingkungan. Retrieved from <https://yklindonesia.org/persoalan-sampah-dan-anak-muda-kota-makassar-di-hari-lingkungan/>



- Mokodompit, T. M. (2021). Kajian Tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Pencemaran Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. *Lex Administratum*, 9(3), 176-186.
- Muhaer, A., Rahim, A., Kamaruddin, C. A., & Hastuti, D. R. (2024). Analisis Minat Berkunjung Wisatawan Pada Objek Wisata Pantai Biru Kota Makassar Dengan Pendekatan Cased Studies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 132-140.
- Riksfardini, M., & Asmara, Q. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara. *PENTAHILIX: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 217-236.
- Saepuloh, D., Firmansyah, D., Susetyo, D., & Suryana, A. (2022). *Quadruple Helix* Collaboration Concept As An Economic Recovery Solution After Covid-19. *Economica*, 10(2), 1-14.
- Sulaksono, H. (2018). Roadblock Implementasi Peran *Quadruple Helix* Dalam Upaya Meningkatkan Kapabilitas Inovasi dan Keunggulan Bersaing. *UNEJ E-Proceeding*, 366-381.